



**PENGAWASAN TERHADAP PERS BUMIPUTERA DI JAWA  
PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG 1942-1945**

**Oleh**

**Dra. Dewi Yuliati, M.A.  
Dra. Yetty Rocwulaningsih, M. Si.  
Drs. Dhanang Respati Puguh  
Dra. Dewi Murni, M.A.**

---

**Dibiayai oleh Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro  
sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian  
Tanggal 25 Agustus 1998 Nomor 3908/PT09.H2/N/1998**

---

**FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**1999**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : PENGAWASAN TERHADAP PERS BUMIPUTERA  
DI JAWA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG  
1942-1945

Bidang ilmu : Sejarah Sosial Politik  
Kategori Penelitian : Pengembangan Ilmu Pengetahuan

*Peneliti Utama*

Nama lengkap dan gelar : Dra. Dewi Yuliati, M.A.  
NIP : 131629778  
Pangkat/Golongan : Penata/III-C  
Jabatan Fungsional : Lektor Muda  
Unit Kerja : Fakultas Sastra UNDIP

Anggota Peneliti : Dra. Yetty Rochwulaningsih, M.Si.  
Drs. Dhanang Respati Puguh  
Dra. Dewi Murni, M.A.

Lokasi Penelitian : Arsip Nasional RI dan Perpustakaan  
Nasional Jakarta, Perpustakaan Sana  
Budaya dan Hatta Foundation Yogya-  
karta, Monumen Pers dan Perpusta-  
kaan Mangkunegaran Surakarta

Lama Penelitian : 6 (enam) bulan

Biaya Penelitian : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Sumber Dana : DIK Rutin UNDIP Tahun 1998/1999

Semarang, 20 Pebruari 1999



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Sastra,

Dr. Idris Sr. Rahayu Prihatmi, M.A.  
NIP. 130 516 887

Ketua Peneliti,

Dra. Dewi Yuliati, M.A.  
NIP. 131 629 778

Menyetujui:

Ketua Lembaga Penelitian UNDIP,



dr. Satoto  
NIP. 131 368 071

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengawasan terhadap pers bumiputera di Jawa pada masa pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Pengawasan ketat harus dijalankan karena pers dimanfaatkan sebagai alat yang sangat strategis untuk propaganda Jepang.

Metode yang digunakan untuk studi ini adalah metode historis, yaitu metode mencari, menemukan, dan menguji sumber-sumber untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah yang otentik dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini fakta-fakta yang ditemukan masih bersifat fragmentaris. Dengan berdasar pada pertanyaan-pertanyaan "apa", "siapa", "di mana", "kapan", "bagaimana", "mengapa" dan "apa jadinya", fakta-fakta tersebut disusun menjadi sebuah tulisan sejarah yang sistimatis, terpadu, dan komunikatif.

Dari studi ini terungkap bahwa pemerintah militer Jepang menerapkan pengawasan yang sangat ketat terhadap pers bumiputera, dengan cara memberlakukan berbagai alat politik seperti keharusan memiliki izin penerbitan dan pelarangan atau pembatalan semua mass media anti-Jepang. Pers bumiputera memanfaatkan situasi ini. Di satu sisi, ia berperan mengungkapkan dan menyebarkan propaganda Jepang untuk kepentingan pemerintah militer Jepang; di sisi lain ia mampu menyampurkan informasi yang telah dimodifikasi serta menyisipkan pernyataan-pernyataan yang bernada pembangunan bangsa dengan tujuan untuk menanamkan kesadaran kebangsaan Indonesia. Hal ini dilakukan dengan sedemikian hati-hati sehingga informasi dan pernyataan-pernyataan tersebut lolos sensor.

## ABSTRACT

The research was conducted to describe the control imposed upon the Indonesian vernacular press by the Japanese military government in Indonesia from 1942 until 1945. Strict control was inevitable because the press were used as a very strategic device for Japanese propaganda.

The method employed for this study was the historical method, one that explores, finds, and examines sources to obtain authentic and reliable historical facts. The facts found in this research were still fragmentary and then they were constructed into a systematic, unified and communicative text based on fundamental questions, namely, "what", "who", "where", "when", "how", "why", and "what becomes of it".

It is revealed from this study that the Japanese military government applied a very strict control on the Indonesian vernacular press by implementing various political devices such as the obligation of having a publication licence and the banning or concellation of all mass media that were anti-Japanese. The Indonesian vernacular press took advantage of this situation. On the one hand, it served the Japanese to promote and spread propaganda to support the interests of the Japanese military government; but, on the other hand, the press was able to deliver modified information and insert nation building statements with the purpose of implanting the Indonesian national consciousness. This was done in such a discreet way that what the press stated managed to escape censor.

## KATA PENGANTAR

Sudah banyak sejarawan melakukan studi sejarah pers di Indonesia. Dari studi-studi yang sudah pernah dilakukan dapat diketahui bahwa kajian secara ilmiah mengenai sejarah pers bumiputera di Jawa pada masa pendudukan Jepang belum pernah dilaksanakan. Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi ruang dalam sejarah pers di Indonesia yang masih belum terisi itu. Studi sejarah pers dipandang mempunyai arti penting bagi pembangunan bangsa dan negara, karena sesungguhnya pers dengan segala dinamikanya merupakan ekspresi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ilmu komunikasi telah dikenal bahwa pers berfungsi memberikan informasi mengenai apa saja yang terjadi dalam lingkungannya, dalam negaranya, dan juga yang terjadi di dunia.

Secara umum telah diketahui bahwa dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 Indonesia telah diduduki oleh Jepang dengan sistem pemerintahan militer yang sangat otoriter. "Bagaimana bentuk kekuasaan otoriter pemerintah militer Jepang terhadap kehidupan pers bumiputera di Jawa" menjadi pusat perhatian kajian ini. Selanjutnya, penelitian ini juga mempertanyakan "berdayakah pers bumiputera di Jawa menyuarakan kepentingan bangsanya di bawah kekuasaan otoriter itu".

Tim peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan berbagai pihak, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, atas segala bantuan yang diberikan, tim peneliti mengucapkan terimakasih, khususnya kepada Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional RI Jakarta, Perpustakaan Sana Budaya dan Hatta Foundation Yogyakarta, Monumen Pers dan Perpustakaan Mangkunegaran Surakarta. Kami berharap, semoga penelitian ini bermanfaat.

Semarang, 20 Pebruari 1999

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Pendekatan	11
G. Metode Penelitian	14
<b>BAB II    KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK PADA MASA           PENDUDUKAN JEPANG 1942-1945</b>	<b>16</b>
A. Organisasi Sosial Politik	21
B. Organisasi Semi Militer dan Militer	29
<b>BAB III   PENGAWASAN TERHADAP PERS BUMIPUTERA DI JAWA           PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG 1942-1945</b>	<b>36</b>
A. Persiapan Pengawasan terhadap Pers	36
B. Bentuk-bentuk Pengawasan terhadap Pers	42
<b>BAB IV    SUARA PERS BUMIPUTERA DI BAWAH PENGAWASAN           PEMERINTAH MILITER JEPANG</b>	<b>52</b>
A. Suara Pers Bumiputera sebagai Pendukung Program Pemerintah Militer Jepang	52
B. Suara Pers Bumiputera sebagai Penyalur Aspirasi Nasional Indonesia	64
<b>BAB V    KESIMPULAN</b>	<b>72</b>
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	78

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejarah telah menunjukkan bahwa pendudukan Jepang di Indonesia sejak Maret 1942 sampai dengan Agustus 1945 telah membawa berbagai perubahan penting di Indonesia. Seorang sejarawan Belanda mengatakan bahwa pada saat itu rakyat Indonesia yang disebutnya sebagai *the meekest people on the earth* (rakyat paling penurut di dunia) telah mengangkat diri mereka dan melancarkan perjuangan kemerdekaan dengan semangat revolusioner (Rommelink, 1978: 63 sebagaimana dikutip oleh Ken'ichi Goto, 1997: 15). Beberapa perubahan penting dapat disebut di sini: Jepang dapat meruntuhkan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda; golongan nasionalis Indonesia dapat memperkuat kepemimpinan politik mereka; Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia dan persiapan kemerdekaan itu hampir selesai pada masa akhir pendudukan; kekuatan pertahanan bumiputera diciptakan; konsolidasi kelompok-kelompok Islam mengalami kemajuan yang penting; dan juga muncul organisasi-organisasi pemuda. Semua ini dinilai sebagai faktor-faktor yang mempunyai kontribusi positif terhadap pencapaian kemerdekaan dan pembentukan perkembangan politik pada masa-masa selanjutnya. Akan tetapi sebaliknya, pendudukan Jepang juga mengakibatkan penderitaan rakyat di Jawa. Kekejaman *Kenpeitai* (polisi militer Jepang), *recruitment romusha* secara paksa, penyerahan



beras secara paksa kepada pemerintah militer Jepang merupakan masalah-masalah penting yang menyebabkan kesengsaraan rakyat.

Kehadiran bangsa Jepang di Indonesia telah didorong oleh kedatangan bangsa Eropa di Asia. Kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16 sangat berpengaruh terhadap bentuk hubungan internasional Jepang. Kita lihat buktinya, dalam tahun 1540 bangsa Portugis datang di Jepang dengan membawa senjata dan memperkenalkan agama Kristen. Kemudian dalam tahun 1600 bangsa Belanda juga datang di negeri ini. Pertama-tama bangsa Jepang tertarik akan teknologi, ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kesempatan kerja yang ditawarkan oleh bangsa Eropa. Hal itu menjadi pendorong bagi orang Jepang untuk mencari penghidupan ke luar negeri. Dalam tahun 1620 tercatat bahwa *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC) mempunyai 80 orang pegawai bangsa Jepang. Belanda juga mempekerjakan ratusan orang Jepang sebagai pelaut dan serdadu (Shigeru Sato, 1994: 3).

Hubungan antara Indonesia dengan Jepang menjadi semakin nyata, setelah di Batavia (Jakarta) didirikan Konsulat Jepang pada tahun 1909. Ketika itu di Batavia terdapat 614 orang Jepang, terdiri atas 448 wanita dan 166 pria. Berdirinya Konsulat Jepang di sini membuka kesempatan bagi orang-orang Jepang untuk migrasi dan juga membuka jalan bagi para pedagang untuk membuka usaha di Indonesia. Mereka menjual obat-obatan, permen, mainan, porselin, dan tekstil. Banyak di antara mereka membuka toko-toko yang dikenal dengan *toko Jepang* (Shigeru Sato, 1994: 4).

Segera setelah pecah perang di Eropa dalam bulan September 1939, Jepang mulai mempersiapkan diri untuk mengadakan ekspansi ke daerah-daerah di sebelah Selatan Jepang. Jauh sebelum melancarkan perang di wilayah Pasifik dalam bulan Desember 1941, Jepang telah melirik Indonesia sebagai daerah yang memiliki posisi penting secara ekonomis, politis, dan strategis. Bagi Jepang, Indonesia memiliki nilai penting, karena negeri ini mempunyai persediaan bahan mentah seperti minyak, karet, timah, boksit, mangan yang sangat diperlukan untuk mendukung kepentingan perang (M.A. Aziz, 1955: 100). Pada tanggal 1 Maret 1942 balatentara Jepang mendarat di Jawa dan memerintah wilayah ini sampai Jepang menyerah kalah kepada Sekutu dalam bulan Agustus 1945.

Pada umumnya kedatangan balatentara Jepang disambut dengan entusias oleh rakyat Indonesia. Ini disebabkan, antara lain, oleh keberhasilan Jepang dalam melancarkan propaganda kepada bangsa Indonesia. Dalam dekade sebelum perluasan kekuasaannya, Jepang telah melakukan propaganda secara intensif di Malaya dan juga di seluruh daerah sebelah Selatan, termasuk Indonesia. Propaganda Pan-Asiatik dilaksanakan secara bertahap, dan Jepang telah memiliki suatu slogan kuat bagi seluruh bangsa Asia: "Asia untuk bangsa Asia". Slogan ini menjadi unsur propaganda Jepang yang terkuat, karena sangatlah sulit bagi bangsa mana pun untuk menemukan *counter-slogan* yang memiliki kekuatan sebanding (Eric Robertson, 1979: 83). Propaganda "Asia untuk bangsa Asia" sangat berpengaruh,

terutama bagi mereka yang masih terjajah oleh bangsa Eropa. Jepang mempunyai keyakinan bahwa bangsa Jepang harus dapat mengatur dunia dengan doktrin Pan-Asianisme atau persatuan seluruh Asia di bawah pimpinan Jepang. Di samping itu Jepang juga mempunyai suatu konsep yang sangat berpengaruh bagi bangsa Asia yakni "Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya", yang dicanangkan pertama kali oleh Menteri Luar Negeri Jepang Matsuoka Yosuke pada tanggal 1 Agustus 1940 dalam suatu konferensi pers (Shigeru Sato, 1994: 6 dan 14-17).

Jika propaganda berhasil, itu berarti pemerintah militer Jepang dapat menarik simpati bangsa Indonesia untuk mengikuti kebijakan-kebijakan, ketentuan-ketentuan, serta prinsip-prinsip yang telah ditentukannya. Oleh karena itu, secara gencar Jepang melaksanakan propagandanya melalui berbagai media seperti surat kabar, buku, pamflet, poster, siaran radio, pidato, sandiwara, musik, dan film.

Penelitian ini memusatkan kajiannya pada pers (dalam hal ini surat kabar) dengan suatu pemahaman bahwa pers sebagai media cetak, yang dapat dibaca berulang-ulang, mempunyai potensi kuat sebagai alat untuk mempengaruhi massa dan membentuk opini umum. Pers dapat berfungsi sebagai alat kontrol dan inovasi masyarakat (Denis McQuail, 1987: 3). Akan tetapi, tidak jarang pers berada dalam situasi yang tertekan. Tekanan itu berasal dari berbagai kekuatan luar termasuk dari penguasa (khususnya penguasa hukum dan politik), para pemasang iklan, para pakar, lembaga lain, dan khalayak (Denis McQuail,

1987: 141). Berkaitan dengan tekanan dari kekuatan luar ini, pemerintah militer Jepang berada dalam posisi sebagai penguasa hukum dan politik yang mengadakan pengawasan ketat terhadap pers. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara menempatkan penasihat-penasihat bangsa Jepang (*shidojin*) di setiap penerbitan di Jawa (A. Latief, 1980: 28). Dengan demikian, pengertian propaganda dalam konteks kekuasaan Jepang di Indonesia dapat diidentifikasi dengan cara-cara untuk mempengaruhi pendapat dan reaksi pihak lain, terlepas dari kebenaran pesan. Di sisi lain, khalayak Indonesia, terutama golongan intelektual, dapat memanfaatkan pers sebagai media penyalur nasionalisme. Bagi para pemimpin pergerakan nasional Indonesia, seperti Soekarno dan Hatta, memang terbuka kesempatan untuk menyuarakan aspirasi nasional melalui pers, karena mereka dimanfaatkan oleh pemerintah militer Jepang untuk mempropagandakan kepentingan-kepentingan Jepang kepada rakyat. Para pemimpin nasionalis tersebut memperoleh kebebasan tertentu dari pemerintah militer Jepang, suatu kebebasan yang tidak pernah mereka peroleh pada masa penjajahan Belanda.

Istilah "pers bumiputera" digunakan untuk menyebut surat kabar harian yang dikelola oleh bangsa Indonesia dan berbahasa Indonesia. Walaupun mempunyai pengertian yang sama dengan kata "pribumi", kata "bumiputera" sengaja dipilih dengan pertimbangan bahwa kata tersebut lebih bernuansa pergerakan nasional Indonesia. Nuansa demikian itu dapat disimak ketika kita membaca surat kabar-surat kabar yang terbit dalam era kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang.

## B. Perumusan Masalah

Penelitian ini berdasar pada dua pertanyaan utama, yaitu "mengapa dan bagaimana pemerintah militer Jepang memberlakukan pengawasan (kontrol) terhadap pers bumiputera", serta "bagaimana pers bumiputera menyikapi pengawasan pemerintah tersebut".

Pertanyaan pertama akan dijawab dengan meneliti ideologi, cara-cara, konsep-konsep, serta kebijakan-kebijakan yang telah dipersiapkan oleh Jepang dalam rangka ekspansi ke wilayah Selatan, termasuk Indonesia. Setelah itu akan diteliti juga mekanisme kontrol terhadap pers yang meliputi lembaga-lembaga, peraturan-peraturan, undang-undang, serta petugas-petugas yang berkompeten.

Jawaban terhadap pertanyaan kedua akan diperoleh dengan cara mengkaji isi surat kabar di Jawa yang meliputi: *Asia Raya* di Jakarta, *Tjahaja* di Bandung, *Sinar Baroe* di Semarang, *Matahari* di Yogyakarta, dan *Soeara Asia* di Surabaya. Analisis isi surat kabar akan dibatasi pada isu-isu sosial-politik selama pendudukan Jepang di Indonesia. Berkaitan dengan hal ini akan dipelajari cara-cara pers bumiputera untuk menyampaikan berita yang mendukung kepentingan pemerintah militer Jepang. Sebaliknya, juga akan dikaji strategi yang dipergunakan oleh pers bumiputera untuk menyuarakan kepentingan bangsa sendiri.

Untuk menempatkan lembaga pengawasan pers serta mekanismenya, dan isi pers bumiputera dalam konteks sosial politik pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, penelitian juga akan mengungkap kondisi sosial-politik secara umum pada saat itu.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara-cara yang dipergunakan oleh pemerintah militer Jepang untuk mengendalikan pers bumiputera di Jawa selama masa pendudukan. Secara lebih rinci penelitian akan mengungkap ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang melatarbelakangi pemberlakuan kontrol terhadap pers, peraturan-peraturan, undang-undang, mekanisme pengawasan terhadap pers, serta penerapannya. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut sangatlah penting untuk menerangkan dinamika kehidupan pers di Jawa pada masa pendudukan Jepang, serta peranannya baik sebagai media propaganda pemerintah militer Jepang maupun sebagai media penyalur aspirasi bangsa Indonesia.

### D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai sikap dan tindakan pemerintah militer Jepang terhadap pers bumiputera, serta gambaran mengenai sikap, perilaku, etos kerja dan cita-cita pers bumiputera pada masa pendudukan Jepang. Pengetahuan semacam itu memiliki nilai penting untuk pengembangan akademis dan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penelitian ini dapat menunjang pengembangan akademis, sebab pemahaman terhadap kehidupan pers pada masa pendudukan Jepang berarti juga perluasan pemahaman terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia. Pada haki-

katnya pers lahir untuk memenuhi keperluan masyarakat akan informasi secara terus menerus mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Pemahaman demikian menjadi penting juga untuk meningkatkan kualitas pers dan wartawan, sebab dari situ dapat diketahui faktor-faktor positif dan negatif. Dalam pembinaan pers nasional dewasa ini, faktor positif dapat diteruskan dan dikembangkan, sedangkan faktor negatif dapat dikurangi bahkan jika mungkin dihilangkan.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Banyak orang telah melakukan studi tentang sejarah pers di Indonesia. A.B. Adam (1984) menyatakan dalam disertasinya, bahwa pers bumiputera merupakan salah satu produk kebudayaan Barat. Dalam disertasi itu, A.B. Adam memusatkan kajiannya pada pertumbuhan pers bumiputera dengan cara mempelajari bagaimana pers mempengaruhi dan mencerminkan perubahan dalam lingkungan masyarakat intelektual Indonesia, dan apa kontribusi mereka untuk mendorong lahirnya cara berpikir moderen yang telah menyebabkan perubahan sistem nilai masyarakat Indonesia. Konsep-konsep adat telah tergeser oleh perubahan tersebut, yang terutama disebabkan oleh perluasan pendidikan moderen, urbanisasi, dan munculnya golongan bangsawan baru yaitu bangsawan intelektual yang menjadi tandingan bagi bangsawan tradisional. Kelompok bangsawan baru itu, kemudian, menjadi pelopor penyebaran kesadaran kebangsaan Indonesia

dengan menggunakan sarana seperti organisasi-organisasi, dan surat kabar. Dengan berdirinya organisasi-organisasi: Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, *Indische Partij*, dan lainnya, surat kabar diperlukan untuk mengekspresikan kesadaran ekonomi dan politik rakyat.

Berbeda dengan A.B. Adam yang telah meneliti sejarah pers bumiputera secara umum dalam era pergerakan nasional Indonesia, Dewi Yuliati (1993) mengadakan penelitian secara khusus terhadap surat kabar *Sinar Djawa* dan *Sinar Hindia*. Surat kabar yang terbit di Semarang pada tahun 1914 sampai dengan tahun 1924 ini, menjadi media pergerakan Sarekat Islam Semarang. Seluruh ide dan aktifitas pergerakan Sarekat Islam Semarang selalu disiarkan oleh surat kabar tersebut. Semula Pemerintah Kolonial Belanda menilai *Sinar Djawa* bersikap moderat. Namun demikian, sejalan dengan meluasnya radikalisme dalam tahun 1917, sikap moderat itu telah ditinggalkannya, karena surat kabar tersebut mulai juga menapak jalan radikal. Pemerintah Kolonial Belanda semakin meningkatkan kewaspadaannya terhadap pers bumiputera. Undang-undang yang mengikat kebebasan pers semakin diperketat. *Sinar Djawa* yang pada tahun 1918 berganti nama *Sinar Hindia* terkena tuntutan delik pers berkali-kali. Meskipun begitu, ranjau delik pers ini tidak pernah menjadi hambatan bagi para jurnalisnya untuk tetap menyuarakan kebenaran, melancarkan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Dalam era penjajahan, pers bumiputera berhadapan dengan bangsa



asing (Belanda) yang berkedudukan sebagai pemerintah. Kondisi ini justru melahirkan semangat kebangsaan yang berkobar-kobar, sehingga resiko tuntutan delik pers seperti dipenjara dan diasingkan justru menjadi cambuk perjuangan para jurnalis bumiputera. Dari kajian itu dapat diperoleh gambaran tentang ide-ide yang menjadi penggerak terjadinya peristiwa sejarah, khususnya sejarah pergerakan Sarekat Islam Semarang.

Edward C. Smith (1983) mengkaji sejarah pembreidelan pers di Indonesia dalam kurun waktu dari 27 Desember 1949, setelah Belanda mengakui kedaulatan pemerintahan Indonesia, sampai dengan 1 Oktober 1965, ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) mencoba mengambil alih kekuasaan namun dapat ditumpas. Untuk memahami kejadian-kejadian dalam kurun waktu yang ditelitinya, Edward C. Smith juga meninjau kekuatan-kekuatan utama pada masa sebelumnya, sejak mulai ada pers di negeri ini. Pada masa awal sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah mencoba membantu pers. Akan tetapi, sesudah kritik-kritik terhadap pemerintah menjadi semakin tajam, pemerintah cenderung memukul balik untuk mempertahankan diri. Presiden Soekarno melakukan tindakan-tindakan kontrol terhadap pers. Surat kabar yang menolak untuk tunduk kepada keinginan Soekarno disingkirkan.

Surat Kabar *Merdeka* menjadi perhatian studi Chaniago dkk. (1987). *Merdeka* terbit di Jakarta dalam bulan Oktober 1945. Surat kabar ini merupakan pembela yang tangguh bagi cita-cita Republik Indonesia. Pendirinya, B.M. Diah, tidak

saja berpengalaman dalam pergerakan nasional, tetapi juga berpengalaman sebagai wartawan pada masa penjajahan Belanda dan masa pendudukan Jepang. Selain itu, ia juga menjadi anggota aktif Angkatan Baru 1945, organisasi kepemudaan yang mendorong lahirnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dilihat dari latar belakang pendirinya, *Merdeka* benar-benar menjadi penyalur suara rakyat yang memperjuangkan kemerdekaan. Kajian Chaniago dkk. ini mempermasalahkan rahasia ketegaran harian *Merdeka* dalam kurun waktu yang cukup panjang. Seni mengelola usaha dan pemberitaan-pemberitaan yang menyangkut isu-isu sosial politik menjadi sorotan utama kajian tersebut.

Setelah mempelajari beberapa studi sejarah pers Indonesia, peneliti melihat bahwa penelitian tentang pers pada masa pendudukan Jepang belum pernah dilakukan. Kajian ini memiliki arti penting untuk menunjukkan "benang merah" dalam perjalanan hidup pers Indonesia.

#### **F. Pendekatan**

Lingkup keilmuan penelitian ini adalah sejarah sosial-politik, sehingga pendekatan politik sangat diperlukan untuk menganalisis unsur-unsur politik yang turut membentuk peristiwa yang dikaji. Politik dapat diartikan sebagai usaha untuk distribusi kekuasaan atau usaha untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan di antara kelompok-kelompok dalam suatu negara (Max Weber dalam James Donald & Stuart Hall, 1986: 17). Negara didefinisikan sebagai suatu lembaga yang memuat hubungan

antara yang berkuasa dan yang dikuasai atau suatu hubungan yang mendukung legitimasi kekuasaan. Beberapa unsur yang sering terdapat dalam proses politik ialah kepemimpinan, ideologi, kekuasaan atau otoritas, organisasi (Sartono Kartodirdjo, 1992: 150).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, Jepang telah melaksanakan paham fasis. Dalam hal ini Jepang mengorganisasi pemerintahan dan masyarakat secara totaliter, di bawah kediktatoran pemerintah yang sangat nasionalis, rasialis, militeris, dan imperialis. Dalam tubuh pemerintahan yang bersifat fasis terdapat pola hubungan antara atasan dan bawahan yang khas. Bawahan harus membungkukkan badan terhadap atasan, dan sebaliknya atasan dapat melakukan penindasan terhadap bawahan. Pemimpin tidak perlu membungkukkan badan terhadap siapa pun, sebaliknya setiap anggota pemerintahan harus bertekuk-lutut kepada seseorang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Praktik-praktik semacam ini juga diajarkan oleh pemerintah militer Jepang kepada rakyat Indonesia yang dapat dilihat melalui siaran-siaran pers.

Orang-orang yang berada di luar kelas penguasa tidak dapat memberi perintah kepada siapa pun. Mereka hanya mempunyai kewajiban untuk selalu bersikap patuh. Mayoritas rakyat dalam negara totaliter hanya dapat melaksanakan perintah dan tidak boleh mempersoalkannya. Hal ini dapat menjadi kesulitan besar bagi setiap bentuk kediktatoran, karena sesungguhnya di balik itu terdapat kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk mengaktu-

aliskasikan diri mereka. Karena kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak mendapat penyaluran, pada suatu saat sikap-sikap kejiwaan semacam itu dapat berubah menjadi rasa permusuhan dan agresi yang tertekan. Menyadari keberadaan faktor psikologis ini para diktator juga selalu waspada terhadap kebencian dan rasa permusuhan yang ditujukan kepada mereka dan rezimnya (William Ebenstein dan Edwin Fogelman, 1987: 121-122).

Sebagai salah satu antisipasi terhadap meluasnya rasa kebencian dan permusuhan kepada Jepang, pengawasan yang sangat ketat terhadap pers harus dijalankan. Pers, sebagai media komunikasi massa, memiliki nilai efektif dan strategis. Pers dapat berperan sebagai *agent of change*, memperluas cakrawala pemikiran, dan membangun simpati massa (F. Rachmadi, 1990: 17-18). Melalui pers pemerintah militer Jepang dapat mempropagandakan program-programnya, dan sebaliknya masyarakat juga dapat menggunakan pers sebagai penyalur aspirasi, pendapat serta kritik atau kontrol sosial. Sehubungan dengan arti penting pers sebagai media komunikasi massa, dalam pandangan fasis pengawasan terhadap pers tentu perlu dilakukan. Dalam ensiklopedi pers disebutkan bahwa pengawasan terhadap pers meliputi peringatan-peringatan resmi, pengawasan pengiriman berita melalui pers, pengawasan penjualan kepada khalayak, diskriminasi dalam subsidi, diskriminasi dalam sumber pemberitaan, anjuran untuk tidak memuat berita tertentu dan lainnya. Pengawasan ini dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap prinsip kebebasan pers apabila disertai

dengan sangsi yang berat dan ketat (Kurniawan Junaedi, 1991: 126).

Salah satu unsur fasisme yang dipraktikkan oleh Jepang yaitu rasialisme dan imperialisme. Menurut doktrin fasis, elit lebih unggul daripada kelompok massa. Oleh karena itu mereka dapat memaksakan kehendak dengan kekerasan kepada rakyat. Dalam pergaulan antarbangsa, "bangsa elit" merasa lebih unggul dari bangsa-bangsa lainnya dan mempunyai hak untuk memerintah mereka. Jepang telah mewujudkan perasaan keunggulan bangsanya dalam bentuk imperialisme yang dibalut dengan konsep "kemakmuran bersama". Untuk menarik dukungan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam peperangan melawan Sekutu, konsep tersebut dipropagandakan secara gencar melalui pers bumiputera. Dengan berkedok konsep tersebut Jepang telah melaksanakan imperialisme di kawasan Asia dan Pasifik demi kemakmuran Jepang sendiri (William Ebenstein dan Edwin Fogelman, 1987: 128).

#### G. Metode Penelitian dan Sumber

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah. Dengan demikian metode yang dipergunakan adalah metode historis, yaitu mencari, menemukan, dan menguji sumber-sumber sehingga dapat diperoleh fakta sejarah yang otentik dan kredibel. Dalam penulisan dilakukan penyusunan fakta-fakta yang masih fragmentaris itu ke dalam suatu uraian yang sistimatis, utuh, dan komunikatif. Untuk mencapai hasil penulisan sejarah yang

demikian, diperlukan suatu penelitian yang tidak saja berangkat dari pertanyaan-pertanyaan pokok tentang "apa", "siapa", "di mana", dan "kapan", tetapi juga berdasar pada pertanyaan "bagaimana", "mengapa" serta "apa jadinya". Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pokok adalah fakta sejarah serta unsur-unsur yang turut membentuk peristiwa di tempat dan pada waktu tertentu. Jawaban terhadap pertanyaan "bagaimana" merupakan rekonstruksi yang menjadikan semua unsur itu terkait dalam suatu deskripsi yang disebut sejarah. Jawaban terhadap pertanyaan "mengapa" dan "apa jadinya" akan menerangkan hubungan kausalitas (Taufik Abdullah, Abdurrachman Surjomihardjo, ed., 1985: xiv).

Sumber utama penelitian ini adalah majalah pemerintah militer Jepang *Kan Po*, dan beberapa surat kabar bumiputera di Jawa pada masa pendudukan Jepang. *Kan Po* memuat peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku selama pendudukan Jepang. Penelitian terhadap surat kabar bumiputera diharapkan dapat mengungkap mekanisme dan aplikasi pengawasan pemerintah militer Jepang terhadap pers, serta menjelaskan dinamika kehidupan dan sikap pers terhadap pengawasan itu.

Di samping sumber-sumber yang disebut di atas, sumber arsip masa pendudukan Jepang di Indonesia juga sangat penting untuk menjelaskan kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat di Jawa pada saat itu. Ini diperlukan untuk menerangkan kehidupan pers bumiputera di Jawa dalam konteks sosial-politik masyarakatnya. Untuk kepentingan verifikasi dan analisis ilmiah, studi ini juga menggunakan beberapa kepustakaan.